

# Eksistensi PKn Sebagai Pendidikan Nilai dalam Membangun Karakter Bangsa

---

Oleh : Edi Saputra

## ABSTRACT

*This article analyzes the existence of civics education learning as a value education in building the character of the nation. Implementation of character education in schools should be grounded to the basic character values, which subsequently developed into the values that better suit the needs, conditions, and school environment itself. Basically, success in life is not determined by a person's knowledge and skills, but also by the ability to manage themselves and others. This suggests that the quality of character education of students are very important to be improved. Character education in schools should begin by giving confidence to students to be able to do positive things in their everyday lives. By implementing the character education, students can become more confident and have good emotional intelligence.*

**Kata Kunci:** Eksistensi PKn, Pendidikan Nilai, Karakter Bangsa

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini tumbuh gagasan yang kuat untuk menempatkan PKn sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan nilai dalam membentuk karakter bangsa. Dalam hal ini PKn erat hubungannya dengan jatidiri. Jatidiri diadaptasi dari *characteristic*, yang dalam bahasa Inggris memiliki sinonim paling dekat dengan *individuality*, *specialty*, *attribute*, *feature*, *characte*. Istilah jatidiri ini dapat diartikan secara bebas sebagai ciri khas atau atribut. Dalam tulisan ini jatidiri dimaksudkan sebagai ciri khas atau atribut konseptual dan empirik dari PKn sebagai pendidikan nilai.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mempunyai dua istilah teknis

yang dapat diterjemahkan menjadi *civic education* dan *citizenship education*. Cogan<sup>1</sup> mengartikan *civic education* sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives" atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *citizenship education* atau

---

<sup>1</sup> Dalam Winataputra, Udin S dan Dasim Budimansyah. 2007. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.

*education for citizenship* oleh Cogan<sup>2</sup> digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup "...both these in-school experiences as well as out-of-school or non-formal/ informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen"

Dengan demikian PKn dalam pengertian sebagai *citizenship education*, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Istilah PKn sebagai "*citizenship education*" atau "*education for citizenship*" pada dasarnya digunakan dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan, pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik.

Akan tetapi penggunaan istilah dari kedua konsep itu mengalami kekeliruan. Hal ini tampak dalam Kurikulum tahun 1975 untuk semua jenjang persekolahan yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun 1976 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1984, sebagai pengganti

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Negara mulai diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi dan pengalaman belajar mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau *Eka Prasetya Pancakarsa*. Perubahan itu dilakukan untuk mewadahi misi pendidikan yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Mata pelajaran PMP ini bersifat wajib mulai dari kelas I SD s/d kelas III SMA/Sekolah Kejuruan dan keberadaannya terus dipertahankan dalam Kurikulum tahun 1984, yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan Kurikulum tahun 1975.

Selanjutnya Undang-Undang No 2/1989 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), yang antara lain Pasal 39, menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan PKn sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Sebagai implikasinya, dalam Kurikulum persekolahan tahun 1994 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila.

Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

untuk mata pelajaran Civics atau PKn atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif hampir empat dasawarsa (1962-1998) itu menunjukkan indikator telah terjadinya ketidakjelasan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikulum.

Krisis atau *dislocation* menurut pengertian Kuhn<sup>3</sup> yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakjelasan konsep seperti: civics tahun 1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinasi politik; civics tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewarganegaraan yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; PKn tahun 1969 yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; PKn tahun 1973 yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 1984 yang tampil menggantikan PKn dengan isi pembahasan P4; dan PPKn 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatkan dari Pancasila dan P4. Krisis operasional tercermin dalam terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak bergeser dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep. Tampaknya semua itu terjadi karena memang sekolah masih tetap diper-

lakukan sebagai *socio-political institution*, dan masih belum efektifnya pelaksanaan metode pembelajaran serta secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma PKn yang secara ajek diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.

Awal-awal reformasi pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru ke arah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih murni, keberadaan dan jati diri mata pelajaran PPKn kembali dipertanyakan secara kritis. Dalam status kedua, yakni sebagai Mata Kuliah Umum (MKU) PKn diwadahi oleh mata kuliah Pancasila dan Kewiraan. Mata kuliah Pancasila bertujuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sedangkan kewiraan, yang mulai tahun 2000 namanya berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, bertujuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warganegara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. Kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, yang mulai tahun 2000 disebut sebagai Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian atau MKPK.

Sebelum wacana ini tuntas, kini tumbuh kebutuhan baru untuk mencari bentuk pendidikan politik dalam bentuk PKn yang lebih cocok untuk latar pendidikan formal, ditambah kembali diwajibkan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di

---

<sup>3</sup> Kuhn, Thomas S. 2000. *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigm dalam Revolusi Sains*. Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Perguruan Tinggi. Ini diharapkan benar-benar dapat meningkatkan kedewasaan seluruh warganegara yang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan adanya sistem pendidikan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat, terasa menjadi sangat mendesak.

Sebagai suatu kerangka konseptual sistemik, PKn terkesan masih belum solid karena memang riset dan pengembangan epistemologi PKn belum berjalan secara institusional, sistematis, dan sistemik. Paradigma PKn yang kini ada kelihatannya masih belum sinergistik. Kerangka acuan teoritik yang menjadi titik tolak untuk merancang dan melaksanakan PKn dalam masing-masing statusnya sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah, atau sebagai program pendidikan disiplin ilmu dan program guru, atau sebagai pendidikan politik untuk masyarakat mengesankan satu sama lain tidak saling mendukung secara komprehensif. Sebagai akibatnya, program PKn di sekolah, di lembaga pendidikan guru, dan di masyarakat terkesan belum sepenuhnya saling mendukung secara sistemik dan sinergistik.

Dewasa ini PKn dirasakan rentan terhadap pengaruh perubahan dalam kehidupan politik dan tidak ajeg dalam sistem kurikulum dan pembelajarannya. Pendidikan gurunya

cenderung terlalu memihak pada tuntutan formal-kurikuler di sekolah dan kurang memperhatikan pengembangan PKn sebagai bidang kajian pendidikan disiplin ilmu. Epistemologi PKn tidak berkembang dengan pesat. Pembelajaran sosial nilai Pancasila cenderung berubah peran dan fungsi menjadi proses indoktrinasi ideologi negara dan tidak kokohnya/tidak koherennya landasan ilmiah PKn sebagai program pendidikan nilai.

## II. PKn SEBAGAI PEDIDIKAN NILAI

Pada dasarnya, pendidikan nilai dirumuskan dari dua kata pengertian dasar pendidikan dan nilai. Kata nilai atau *value* berasal dari bahasa latin *valere* atau bahasa prancis kuno *valoir* yang berarti harga. Namun ketika kata tersebut dihubungkan dengan obyek atau di persepsi dalam sudut pandang tertentu maka akan mempunyai tafsiran yang beragam, ada nilai atau harga menurut ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, politik ataupun agama.

Ada beberapa arti nilai menurut para ahli, seperti dikutip oleh Aryani<sup>4</sup>, yakni: a) Gordon Allport (1964) seorang ahli psikologi mendefinisikan nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya; b) Kuperman (1983) mengatakan nilai adalah patokan *normative* yang mempengaruhi manu-

---

<sup>4</sup> Aryani, Ine Kusuma dan Markum Susatin. 2010. *PKn Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia

sia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan *alternative*; c) Hans Jonas mengatakan bahwa *value is address of a yes*, nilai adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan kata “ya”; d) Kluckholhn (1957) mendefinisikan nilai sebagai konsepsi dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan.

Di sini nampak definisi nilai sebagai makna yang abstrak, bukan hanya sebagai harga suatu benda atau barang. Oleh karena itu memilih definisi bukan untuk menyalahkan definisi lain, tetapi tergantung dari sudut mana seseorang mendefinisikan *nilai*. Namun untuk kebutuhan pengertian nilai yang sederhana yang mencakup keseluruhan aspek yang terkandung dalam empat definisi di atas dapat ditarik suatu definisi baru yakni nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.

Dari beberapa definisi yang telah ada dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan nilai adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Walaupun bagi sebagian kalangan, pendidikan nilai mungkin dianggap setara dengan pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan karakter atau pengembangan afektif. Namun perlu ditegaskan bahwa pendidikan yang dimaksud adalah tidak memihak salah satu dari jenis-jenis pendidikan tersebut. Istilah pendidikan nilai di sini dimaksudkan untuk mewakili semua konsep dan

tindakan pendidikan yang menaruh perhatian besar terhadap pengembangan nilai *humanistic* maupun *teistik*.

Sebagai perbandingan, penerapan konsep-konsep pendidikan nilai menurut Sofyan Sauri<sup>5</sup> pernah diterapkan pada sebuah lembaga pendidikan di Thailand dengan menggunakan suku kata yang terdapat dalam kata *EDUCATION* yang memiliki arti sebagai sebagai berikut:

**E** = Singkatan untuk *Enlightenment* (pencerahan). Ini adalah proses pencapaian pemahaman dari dalam diri atau bathin melalui peningkatan kesadaran menuju pikiran super sadar yang akan memunculkan intuisi, kebijaksanaan, dan pemahaman.

**D** = Singkatan untuk *Duty and Devotion* (tugas dan pengabdian). Pendidikan harus membuat siswa menyadari tugasnya dalam hidup. Selain memiliki tugas atau kewajiban yang terhadap orang tua dan keluarga, siswa juga memiliki kewajiban yang berlandaskan cinta kasih dan belas kasih untuk melayani dan menolong semua orang di masyarakat dan di dunia.

**U** = Singkatan untuk *Understanding* (pemahaman). Ini bukan hanya mengenai pemahaman terhadap mata pelajaran yang diberikan dalam kurikulum nasional tetapi juga penting untuk memahami diri sendiri.

**C** = Singkatan untuk *Character* (karakter). Guru mesti membentuk karakter yang baik pada diri siswa.

---

<sup>5</sup> Sauri, Sofyan dan Herlan Firmansyah. 2010 *Meretas Pendidikan Nilai*. Bandung CV Armico.

Seorang yang berkarakter adalah seorang yang memiliki kekuatan moral dan lima nilai kemanusiaan yaitu Kebenaran, Kebajikan, Kedamaian, Kasih sayang dan tanpa Kekerasan. Nilai kemanusiaan tersebut harus terpadu dalam pembelajaran di kelas.

**A** = Singkatan untuk *Action* (tindakan). Para siswa kini belajar dengan giat dan menuangkan pengetahuan yang dipelajarinya dalam ruang ujian dan keluar dengan kepala kosong. Pengetahuan yang mereka peroleh tidak diterapkan dalam tindakan. Pendidikan seperti itu tak berguna. Apapun yang dipelajari siswa mesti diterapkan dalam praktek. Model pembelajaran yang baik mesti membuat hubungan antara yang dipelajari dan situasi nyata dalam hidup. Hal ini akan memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuan ke dalam hidup mereka sendiri.

**T** = Singkatan untuk *Thanking* (berterima kasih). Siswa mesti belajar berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu mereka. Di atas segalanya adalah orang tua yang telah melahirkan dan mengasuh mereka. Siswa harus mengasihi dan menghormati orang tua mereka. Selanjutnya siswa harus berterima kasih kepada guru-guru, karena siswa memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan melalui guru-guru. Maka siswa mesti mengasihi dan menghormati guru. Demikian pula, siswa telah mendapatkan banyak hal dari masyarakat, dari bangsa, dari dunia,

dan alam. Siswa mesti selalu berterima kasih kepada semua hal.

**I** = Singkatan untuk *Integrity* (Integritas). Integritas adalah sifat jujur dan karakter menjunjung kejujuran. Siswa mesti tumbuh menjadi seseorang yang memiliki integritas, yang bisa dipercaya untuk menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing.

**O** = Singkatan untuk *Oneness* (kesatuan). Pendidikan mesti membantu siswa melihat kesatuan dalam kemajemukan. Apakah kita memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda, warna kulit dan ras yang berbeda. Kita mesti belajar hidup damai dan harmonis dengan alam.

**N** = Singkatan untuk *Nobility* (kemuliaan). Kemuliaan adalah sifat yang muncul karena memiliki karakter yang tinggi atau mulia. Kemuliaan tidak timbul dari lahir tetapi muncul dari pendidikan. Jadi, kemuliaan terdiri dari semua nilai-nilai yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas, kunci pendidikan nilai terletak pada penanaman nilai-nilai luhur ke dalam diri peserta didik. Nilai-nilai tersebut diantaranya berupa (a) kecintaan terhadap Tuhan dan segenap ciptaan-Nya (*love Allah, trust, reverence, loyalty*); (b) tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian (*responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness*); (c) kejujuran/amanah dan arif (*trustworthines, honesty, and tactful*); (d) hormat dan santun (*respect, courtesy, obedience*);

(e) dermawan, suka menolong dan gotong-royong/kerjasama (*love, compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation*); (f) percaya diri, kreatif dan pekerja keras (*confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination, enthusiasm*); (g) kepemimpinan dan keadilan (*justice, fairness, mercy, leadership*); (h) baik dan rendah hati (*kindness, friendliness, humility, modesty*) toleransi, kedamaian dan kesatuan (*tolerance, flexibility, peacefulness, unity*)

### III. PKn SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti *to mark* atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti *reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai*

*waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib.* Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu jugamampu *bertindak* sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku).

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang *terbaik* terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan *kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya)*.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai *the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development*. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan.

Disamping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.

Menurut David Elkind & Freddy Sweet<sup>6</sup>, pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut: *character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within.*

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak pesertadidik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.

Menurut T. Ramli<sup>7</sup>, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia

yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai *the golden rule*. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas. Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus

---

<sup>6</sup> Dalam Saputra, Edi. 2011. "Nilai-Nilai Apa yang akan Dikembangkan, Diwariskan, dan Dididik oleh PKn". Padang: Ganto UNP

<sup>7</sup> *Ibid*



berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri.

Kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan saja, tetapi kemampuan mengelola diri dan orang lain. Rata-rata kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 dan sisanya 80 persen oleh mengelola diri. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan mengelola diri daripada pengetahuan saja. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan. Penanaman pendidikan karakter disekolah dapat dimulai dengan memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk dapat melakukan hal-hal positif sesuai dengan kemampuannya, membaca doa setiap sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan, menggalang dana untuk teman-temannya yang sedang sakit atau terkena musibah, mendirikan kantin jujur, dan lain-lain yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik. Dengan menerapkan pendidikan karakter, orang lebih percaya diri dan memiliki kecerdasan emosional yang baik.

Dengan demikian dapat dikatakan pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut,

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Pembinaan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya, pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hubungan pendidikan karakter dengan manusia adalah sangat penting.

#### **IV. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER**

Dari konsep di atas, saat ini yang menjadi pertanyaan adalah nilai-nilai apa yang akan dikembangkan, diwariskan, dan dididik oleh PKn dalam membentuk karakter bangsa. Dimana PKn berbasis nilai berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda nilai-nilai yang mereka anut, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda. PKn berbasis nilai juga membantu

siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan terhadap nilai-nilai yang beragam, membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan nilai-nilai mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat. PKn berbasis nilai diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif nilai yang berbeda dengan nilai yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan nilai-nilai yang mereka yakini.

Untuk memaknai kembali akan arti dari pentingnya menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka diperlukan PKn berbasis nilai. Sebab secara substantif PKn adalah satu-satunya mata pelajaran yang diamanahkan untuk membentuk karakter siswa sebagai warga Negara yang baik. Tantangan yang dihadapi guru PKn tentunya tidak mudah mengingat salah satunya adalah pengajaran PKn di Indonesia yang masih pada titik minimal, sebagaimana yang dikemukakan oleh David Kerr<sup>8</sup> bahwa *Citizenship Education* pada titik minimal ditandai oleh: “*Thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice*”. Maksudnya adalah didefinisikan secara sempit, pendidikan

kewarganegaraan hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan yang bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur.

Apa bila PKn diajarkan hanya sampai pada titik minimal ini maka akan dikhawatirkan juga tidak dapat menyentuh pada pewarisan nilai yang diharapkan. Oleh sebab itu sebagai renungan akhir, mengapa tidak mencoba menata pengajaran PKn sampai pada titik maksimal. Lebih lanjut David Kerr<sup>9</sup> menambahkan bahwa yang bersifat maksimal ditandai oleh: “*Thick, inclusive, activist, citizenship education, participative, proses-led, values-based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice*”. Maksudnya adalah didefinisikan secara luas, pendidikan kewarganegaraan mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal, dilabeli dengan “*citizenship education*”, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar. PKn tidak hanya tanggung jawab guru PKn, melainkan menjadi tanggung jawab semua komponen yang ada. Dengan perkataan lain, PKn seyogyanya diorganisasikan secara lintas-bidang

---

<sup>8</sup> Dalam Saputra, Edi. 2003. “Paradigma Pelajaran PPKn dalam Proses Demokratisasi”. Padang: Ganto UNP

---

<sup>9</sup> *Ibid*

ilmu, dengan PKn yang partisipatif dan interaktif, isi dan proses dikaitkan dengan kehidupan nyata, diselenggarakan dalam suasana demokratis, diupayakan mewadahi keanekaragaman social budaya masyarakat, dan dikembangkan bersama antara sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah<sup>10</sup>.

Dengan kata lain, PKn yang dimaksud di sini bukanlah PKn dalam arti sempit (*legal status*) saja yakni membahas segi-segi fungsi-fungsi politik, *government*, dan sebagainya, tetapi juga dalam arti luas yang juga menyangkut masalah *desirable personal qualities* (kepribadian seseorang yang nanti bermuara pada pewarisan nilai-nilai yang dianut oleh warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Selama ini, dalam pendidikan PKn nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai-nilai yang bersumber dari cara berfikir dialetika yang dicetus oleh Socrates. Nilai itu muncul karena proses berfikir manusia dari akal nya. Sesuatu itu akan dipandang baik dan buruk karena proses pemikiran akal manusia, sehingga melahirkan perilaku dan nilai yang hidup dalam budaya masyarakat. Namun akan kembali berubah dan berganti karena pemikiran akal manusia itu sendiri. Begitulah sterusnya.

Dalam kondisi inilah, standar nilai yang akan diwariskan akan nampak “abu-abu” dan akan saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Nilai toleransi, kerjasama, gotong royang, kebebasan, persaudaraan

akan dimaknai lain oleh individu dan masyarakat.

Pada tulisan singkat ini penulis mencoba menawarkan nilai-nilai apa yang akan dikembangkan, diwariskan, dan dididik oleh PKn. Pertama harus dicoba melihat dari mana sumber nilai yang akan dikembangkan. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis menggunakan pendekatan wahyu. Artinya nilai yang dikembangkan berasal dari wahyu Tuhan bukan akal pemikiran manusia semata.

Nilai yang dikembangkan saat ini pada dasarnya merupakan pengaruh pengagungan akal yang dicetus Socrates pada masa Yunani, diadopsi oleh para ilmuwan Barat dan berpengaruh pada pemikiran Dunia Timur (Indonesia). Ini wajar karena kondisi masyarakat barat yang tidak punya wahyu dibandingkan dunia timur yang merupakan tempat turunnya wahyu yang menjadi pedoman agama besar di dunia seperti Islam. Maka nilai yang berkembang adalah nilai yang bersumber dari akal yang mengeyampingkan wahyu.

Untuk bagi bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Dengan demikian, tinjauan

---

10

Pancasila berlandaskan pada tuhan, manusia, rakyat, dan adil sehingga nilai-nilai pancasila memiliki sifat objektif. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri Negara yang memuat nilai-nilai luhur untuk menjadi dasar Negara yang secara hirakhi yang tertinggi itu adalah TUHAN. Artinya semua nilai yang dikembangkan harus berdasarkan KETUHANAN.

Tentu timbul pertanyaan bahwa TUHAN yang dipahami dalam masyarakat yang multikultural bukan TUHAN-nya ISLAM saja, tetapi masih banyak TUHAN lain menurut agama yang mereka yakini seperti kristen misalnya. Untuk itu nilai yang perlu kita warisi pada peserta didik PKn adalah yang bersifat nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. *Nilai dasar* adalah asas-asas yang terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan, sesuai dengan UUD 1945, dan yang mencerminkan hakikat nilai kultural. *Nilai instrumental* adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud nilai sosial atau norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Sementara *nilai praktis* adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan bahan ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak.

Untuk itu yang dilakukan untuk mendidik peserta didik tidak memaksakan untuk dihafal tanpa ada kebebasan berfikir dan tidak pernah benar-benar peduli terhadap apa yang mereka pikirkan. Mendidik tidak menjejaki anak dengan pelajaran yang terlalu banyak, sehingga mereka menjadi kehilangan selera dan nafsu belajar, bahkan merasa muak dengan semua itu. Banyak diantara mereka dengan anggapan PKn pelajarannya mudah karena hanya menghafal.

## V. PENUTUP

Dalam pelaksanaan pendidikan nilai melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk juga dalam mata pelajaran lainnya, para pendidik haruslah menempatkan anak didik sebagai objek dan bukan sebagai subjek didik. Berikan kesempatan pada mereka dalam berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan berfikir holistik. (menyeluruh), kreatif, objektif, dan logis, serta memanfaatkan *Quantum Learning* sebagai salah satu paradigma menarik dalam pembelajaran, serta memperhatikan ketuntasan belajar secara individual.

Pendidikan harus mampu menerapkan pembelajaran sampai anak menguasai materi pelajaran secara tuntas. Dalam mengelola pembelajarannya seharusnya guru (pendidik) tidak begitu saja berpindah dari satuan pembelajaran satu ke pelajaran berikutnya. Pendidik harus memperhatikan siswa-siswa yang lamban, kurang memahami, atau bahkan gagal

mencapai tujuan yang direncanakan, sehingga tidak dijumpai anak sudah

dinyatakan tamat atau lulus tetapi tidak menguasai pelajaran tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aryani, Ine Kusuma dan Markum Susatin. 2010. *PKn Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kuhn, Thomas S. 2000. *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigm dalam Revolusi Sains*. Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saputra, Edi. 2003. "Paradigma Pelajaran PPKn dalam Proses Demokratisasi". Padang: Ganto UNP
- \_\_\_\_\_. 2011. "Nilai-Nilai Apa yang akan Dikembangkan, Diwariskan, dan Dididik oleh PKn". Padang: Ganto UNP
- \_\_\_\_\_. 2003. "Paradigma Pelajaran PPKn dalam Proses Demokratisasi. Padang: Ganto UNP.
- Sauri, Sofyan dan Herlan Firmansyah. 2010 *Meretas Pendidikan Nilai*. Bandung CV Armico.
- Winataputra, Udin S dan Dasim Budimansyah. 2007. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.

